

Peningkatan Tata Kelola & Kompetensi SDM Menuju Bisnis Berkelanjutan LPD Kukuh, Marga -Tabanan

I Putu Mega Juli Semara Putra¹⁾, Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra²⁾, Putu Kepramareni³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail: megaebat@unmas.ac.id, kusumamahaputra1967@gmail.com, pkepramareni@unmas.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian dilakukan di LPD Desa Kukuh, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Pengabdian mengusung tema “Peningkatan Tata Kelola & Kompetensi Sumber Daya Manusia Menuju Bisnis Berkelanjutan LPD Kukuh, Marga -Tabanan”. Dalam kesempatan ini dilakukan diskusi dengan seluruh pengurus LPD dengan format “*Metemu Wirasa*”. Permasalahan utama yang dibahas adalah: (1). Persaingan LPD dengan lembaga keuangan lainnya, menyebabkan turunnya status LPD dari “sehat” menjadi “cukup sehat”; (2). Kredit macet, karena tidak ada niatan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Dari hasil diskusi didapatkan kesimpulan: (1). Perlunya di sosialisasikan kembali keberadaan LPD di desa adat; (2). Perlu diberikan pemahaman tujuan, fungsi, dan manfaat LPD untuk *krama* desa adat; (3). Diperlukan adanya regulasi yang lebih ketat dan mengikat dari LPD; (4). Diperlukan sistem pemberian kredit yang lebih baik oleh LPD; (5). Perlu ditumbuhkan rasa memiliki LPD oleh seluruh *krama* desa adat.

Kata kunci: bisnis berkelanjutan, kompetensi sumber daya manusia, LPD, tata kelola

ABSTRACT

The service was carried out at the Kukuh Village LPD, Marga District, Tabanan Regency. The dedication carries the theme "Improving Governance and Human Resource Competency Towards Sustainable Business: LPD Kukuh, Marga-Tabanan." On this occasion, a discussion was held with all LPD administrators in the format "Metemu Wirasa." The main problems discussed are: (1) LPD competition with other financial institutions has resulted in a decline in LPD status from "sehat" to "cukup sehat" (2). bad credit because the borrower has no intention of fulfilling his obligations. From the results of the discussion, the following conclusions were obtained: (1) The need to re-socialize the existence of LPDs in traditional villages (2) It is necessary to provide an understanding of the purpose, function, and benefits of LPD for traditional village manners (3). There is a need for stricter and more binding regulations from the LPD. A better credit-granting system is needed by LPD (5). It is necessary to foster a sense of ownership of the LPD through all traditional village manners.

Keywords: sustainable business, human resource competency, LPD, governance

PENDAHULUAN

LPD sebagai bagian dari sistem keuangan di tingkat desa sudah terbukti mampu menggerakkan putaran ekonomi di tingkat desa, (Sudiarsa, Mardika, & Ramantha, 2022). Putaran ekonomi yang baik ditingkat desa akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. secara tidak langsung, hal ini menunjukkan sisi positif dari peran LPD dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan ekonomi pedesaan. Akan tetapi, tata kelola LPD ke arah yang lebih profesional dengan tetap memperhatikan tujuan awal pembangunan LPD sebagai kekuatan keuangan desa, belum sepenuhnya dapat dilakukan. Sebelum bercerita lebih lanjut, sebaiknya kita menilik kebelakang melihat sejarah adanya LPD di Bali.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan berdasarkan gagasan dari Gubernur Bali periode 1978-1988, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Gagasan pendirian LPD diilhami keberadaan Lumbung Pith Nagari (LPN) yang merupakan lembaga simpan pinjam untuk masyarakat adat di Padang Sumatera Barat yang sukses membawa manfaat bagi masyarakat. LPD diluncurkan dengan mengadopsi konsep sekaa dan desa adat yang telah tumbuh sejak lama di dalam masyarakat Bali. LPD dilandasi untuk meningkatkan taraf hidup *krama* di *desa pakraman*, mengurangi peran rentenir di tengah *desa prakaman*, mengatasi kesulitan mengakses kredit perbankan dan menjaga adat dan budaya Bali yang berlandaskan pada konsep *Tri Hita Karana*, (LPD Bali, 2023.). Sebagai langkah awal, dibuat pilot project satu LPD di tiap-tiap kabupaten. Kala itu, dasar hukum pembentukan LPD hanyalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, tanggal 19 Nopember 1984. Sebagai Implementasi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tersebut, pada 1 Maret 1985, LPD secara resmi mulai beroperasi (Wati, 2020).

LPD yang pertama kali berdiri di Kabupaten Badung yakni LPD Desa Adat Lukluk, Mengwi yang didirikan tanggal 7 Maret 1985. Di Kecamatan Kuta, desa adat yang pertama kali mendirikan LPD merupakan desa adat Legian. Sedangkan, LPD Desa Adat Kedonganan merupakan LPD kedua yang berdiri Kecamatan Kuta. Hingga saat ini berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun, ada 1.493 desa adat di Bali (PemprovBali, 2020) yang memiliki Lembaga Perkreditan Desa. Pembentukan LPD mencapai 1.436 LPD atau 96,2 persen dengan total jumlah desa adat. Akan tetapi, baru 91,1% atau 1.308 LPD yang beroperasi. Sehingga ada 128 LPD yang tidak beroperasi (Wiratmini, 2021).

Kembali pada tujuan luhur didirikannya LPD, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat desa, maka sudah selayaknya LPD dikelola dengan baik. LPD sangat diperlukan keberadaannya untuk dapat menjamin perwujudan atas kesejahteraan masyarakat hukum adat yang dimana yaitu *Krama Desa Adat*, (Nugraha & Atmadja, 2020). Permasalahan yang kemudian muncul di LPD Desa Kukuh, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan adalah:

1. Bagaimana menghadapi persaingan berat dengan bank dan lembaga keuangan lain?
2. Kredit macet, karena tidak ada niatan peminjam untuk memenuhi kewajibannya

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian dilakukan di LPD Desa Kukuh, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Pengabdian mengusung tema “Peningkatan Tata Kelola & Kompetensi Sumber Daya Manusia Menuju Bisnis Berkelanjutan LPD Kukuh, Marga -Tabanan”. Dalam kesempatan ini dilakukan diskusi dengan seluruh pengurus LPD dengan format “*Metemu Wirasa*”. Dinamakan *metemu wirasa* yang dalam arti bebas kata *metemu* artinya pertemuan/ bertemu dan kata *wirasa* yang artinya ekspresi perasaan/bertukar pikiran. Pada kesempatan ini narasumber I Putu Mega JSP, didampingi Bendesa Adat Kukuh I Gusti Ngurah Artha Wijaya saling bertukar pikiran dengan seluruh staf LPD Desa Adat Kukuh. Permasalahan utama yang dibahas adalah: (1). Persaingan LPD dengan lembaga keuangan lainnya, menyebabkan turunnya status LPD dari “sehat” menjadi “cukup sehat”; (2). Kredit macet, karena tidak ada niatan peminjam untuk memenuhi kewajibannya.

Sebelum menjawab permasalahan, narasumber memberikan beberapa pertanyaan sebagai dasar untuk menjawab dan memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi LPD:

1. Sudahkah masyarakat desa adat tahu akan keberadaan LPD?
2. Kenalkah masyarakat desa adat dengan LPD nya?
3. Tahukah masyarakat desa adat konsep dan tujuan didirikannya LPD?
4. Bagaimana kedudukan LPD di desa adat?
5. Apa keuntungan transaksi di LPD?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam *metemu wirasa* didiskusikan hal terkait permasalahan yang dihadapi LPD Desa Adat Kuku. Untuk menjawab permasalahan LPD, maka narasumber memberikan beberapa poin pertanyaan terlebih dahulu:

Sudahkah masyarakat desa adat tahu akan keberadaan LPD? Tujuan pertanyaan ini adalah memastikan bahwa masyarakat desa adat mengetahui keberadaan LPD, jangan sampai masyarakat tidak mengetahui LPD di desanya. Kondisi ini berkaitan dengan adanya pertimbangan masyarakat memilih LPD untuk bertransaksi. Dari hasil diskusi didapat informasi bahwa sebagian besar masyarakat sudah tahu dengan keberadaan LPD di desanya.

Kenalkah masyarakat desa adat dengan LPD nya? Tujuan pertanyaan ini adalah untuk memastikan masyarakat tidak hanya sekedar tahu keberadaan LPD, tetapi juga mengenal LPD yang ada di desanya. Jika sudah mengenal, maka akan meningkatkan keinginan untuk memanfaatkan LPD dalam bertransaksi keuangan. Dari hasil diskusi masyarakat hanya tahu keberadaan LPD tetapi belum mengenal lebih jauh.

Tahukah masyarakat desa adat konsep dan tujuan didirikannya LPD? Tujuan pertanyaan ini adalah untuk memastikan masyarakat mengetahui lebih jauh keberadaan LPD, karena konsep dan tujuan pendirian LPD adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, maka diharapkan loyalitas masyarakat kepada desanya sendiri akan dapat dioptimalkan dengan bertransaksi di LPD. Dari hasil diskusi dapat diambil kesimpulan pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan didirikannya LPD masih minim.

Bagaimana kedudukan LPD di desa adat? Tujuan pertanyaan ini adalah memastikan bahwa seluruh organ dalam LPD adalah bagian dari desa adat dan berfungsi sebagaimana mestinya, maka dengan pemahaman bahwa kedudukan LPD tidak terpisahkan dengan desa adat, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh kepada LPD di desanya. Dari hasil diskusi masyarakat masih sedikit yang memahami kedudukan serta organ-organ dalam LPD.

Apa keuntungan transaksi di LPD? Pertanyaan ini memiliki tujuan untuk memastikan masyarakat desa adat mengetahui apa saja keuntungan bertransaksi di LPD dan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Sehingga LPD akan menjadi pilihan dalam transaksi keuangan masyarakat. Dari hasil diskusi, LPD masih minim membuat program yang inovatif dan mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui program-

program LPD yang menguntungkan. Berikut ditampilkan dokumentasi kegiatan *metemu wirasa*:



Gambar 1. Narasumber didampingi *Bendesa* Adat Kukuh dan *Pemucuk* LPD Kukuh



Gambar 2. *Metemu Wirasa* dengan Seluruh Pengurus LPD Desa Adat Kukuh



Gambar 3. Peserta Pengabdian Masyarakat di Desa Adat Kukuh

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil *metemu wirasa* di dapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1). Perlunya di sosialisasikan kembali keberadaan LPD di desa adat; (2). Perlu diberikan pemahaman tujuan, fungsi, dan manfaat LPD untuk *krama* desa adat; (3). Diperlukan adanya regulasi yang lebih ketat dan mengikat dari LPD; (4). Diperlukan sistem pemberian kredit yang lebih baik oleh LPD; (5). Perlu ditumbuhkan rasa memiliki LPD oleh seluruh *krama* desa adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan dukungan berbagai pihak, maka pengabdian masyarakat di Desa Kukuh, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: (1). Bapak I Made Sugianto selaku *Perbekel* Desa Kukuh, Marga, Tabanan, atas ijin dan arahannya sehingga pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana;

(2) Bapak I Gusti Ngurah Artha Wijaya selaku *Bendesa Adat* Kukuh; (3) Bapak I Nyoman Sukarata, selaku *Pemucuk* LPD, beserta seluruh staf LPD Desa Adat Kukuh; (4). Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu panitia pelaksana, sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- LPD Bali. (n.d.). LPD Bali. Retrieved November 27, 2023, from <https://lpdbali.com/>
- Nugraha, K., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Sistem Pemberian Kredit Perumahan Krama (Krama) Dengan Prinsip Ringankan Krama 'Mipil' Pada LPD Desa Adat Kedonganan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...)*, 11(1), 397–406. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/26210>
- PemprovBali. (2020). 1.493 Desa Adat di Bali Miliki Pararem Pencegahan Gering Agung - Pemerintah Provinsi Bali. Retrieved December 29, 2021, from Pemerintah Provinsi Bali website: <https://www.baliprov.go.id/web/1-493-desadadatdi-bali-miliki-pararem-pencegahan-gering-agung-2/>
- Sudiarsa, I. W., Mardika, I. W. G., & Ramantha, I. W. (2022). *Dinamika dan Kontribusi LPD di Bali ke Masyarakat*. Yaguwipa.
- Wati, N. W. A. E. (2020). Kinerja Keuangan Dan Penyaluran Dana Sosial Yang Berlandaskan Tri Hita Karana (Thk) Pada Lembaga Perkreditan Desa. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 97–112. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.554>
- Wiratmini, N. P. E. (2021). Percepat Digitalisasi, BPD Bali Perluas QRIS ke Pelosok Desa. Retrieved December 4, 2023, from Bali.Bisnis.com website: <https://bali.bisnis.com/read/20210412/538/1379929/percepat-digitalisasi-bpd-bali-perluas-qr-is-ke-pelosok-desa>